

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan air minum di masyarakat Kota Cirebon dipenuhi sebesar 82,2% atau sebagian besar dipenuhi dari air perpipaan (PDAM dan non PDAM) dan sumur gali penduduk dengan kualitas hasil pemeriksaan sampel air 75,2% tercemar secara bakteriologis. Untuk memenuhi ketersediaan air berkualitas tersebut banyak dilakukan dengan membeli air minum dari depot air minum maupun air kemasan. Seiring dengan semakin menjamurnya usaha Depot Air Minum (DAM) isi ulang, maka timbul beberapa permasalahan mengenai kualitas DAM isi ulang.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan terhadap konsumen dalam usaha Depot Air Minum dan kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan terhadap konsumen dalam usaha Depot Air Minum di Kota Cirebon serta upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dihubungkan dengan data primer yang diperoleh di lapangan atau fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data primer berupa hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dan data sekunder yang berupa bahan hukum.

Hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan konsumen telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon mulai tahap proses perijinan dan Sertifikat Laik Hygienis Sanitasi, fasilitas Depot Air Minum isi ulang, tahap pengolahan air minum isi ulang, tahap proses jual beli air minum isi ulang, pengawasan dan pembinaan serta pada kompensasi kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari 66 DAM di Kota Cirebon, ada 19 DAM yang sudah memperpanjang ijin Laik Hygiene Sanitasi dan 47 DAM lainnya yang belum memperpanjang ijin, dikarenakan 47 depot tersebut tidak menggunakan *Reverse Osmosis* (RO) lagi setelah usahanya berjalan. Hal ini disebabkan mahalnya harga alat *Reverse Osmosis* (RO) yang harus terpasang untuk menurunkan kadar bakteriologis *E Coli* dan *Coliform* pada air minum isi ulang.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan terhadap konsumen dalam usaha Depot Air Minum di Kota Cirebon ada pada DAM yang belum perpanjangan ijin dan dinyatakan tidak Laik Hygiene Sanitasi; tidak memungkinkannya penjelasan dan memperlihatkan alat-alat pengolahan air minum isi ulang kepada konsumen; semakin bertambahnya DAM yang ada di Kota Cirebon. Kendala dari Konsumen, antara lain minimnya pengetahuan masyarakat (konsumen) tentang persyaratan kualitas kesehatan air minum dan tentang persyaratan teknis Depot Air Minum yang Laik Higienis Sanitasi; masyarakat (konsumen) lebih ingin cara mudah dan cepat tanpa harus pergi ke DAM. Kendala dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon, antara lain minimnya pengaduan dari masyarakat; sistem hukum Indonesia yang tidak memungkinkan suatu sengketa diselesaikan dengan cepat; Dinas Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti depot-depot yang tidak memiliki izin dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur lebih jelas mengenai hal tersebut, dan hanya dapat memberikan teguran dan tidak bisa memberikan sanksi yang lain.

Kata Kunci : Implementasi Perlindungan Konsumen, Usaha Depot Air Minum

ABSTRACT

The fulfillment of drinking water needs in the people of Cirebon City was fulfilled at 82.2% or mostly fulfilled from piped water (PDAM and non PDAM) and population dug wells with the quality of inspection results of 75.2% water samples contaminated bacteriologically. To fulfill the availability of quality water, a lot is done by buying drinking water from drinking water depots and bottled water. Along with the proliferation of refill drinking water depots (DAM) businesses, several problems arise regarding the quality of refill DAM.

The purpose of this research is to know and analyze the implementation of protection for consumers in the Drinking Water Depot business and the obstacles faced in the implementation of protection for consumers in the Drinking Water Depot business in Cirebon City and efforts to overcome them.

This study uses an empirical juridical approach, namely the legal approach as a social and cultural reality in analyzing problems is done by integrating legal materials associated with the primary data obtained in the field or facts that exist from the problems to be studied. The data needed in the study are primary data in the form of interviews and direct observations in the field and secondary data in the form of legal material.

The result showed that consumer protection was carried out by the Cirebon City Health Office starting from the licensing process and Hygienic Sanitation Certificate, Refill Water Depot facilities, refill drinking water treatment stage, process of buying and selling drinking water refill, supervision and guidance as well as compensation for losses that may be experienced by consumers in accordance with applicable regulations. Of the 66 DAMs in Cirebon City, there are 19 DAMs that have extended the Permit for Hygiene Sanitation and 47 other DAMs that have not extended the permit, because the 47 depots did not use Reverse Osmosis (RO) again after the business was running. This is due to the high price of the Reverse Osmosis (RO) tool that must be installed to reduce the bacteriological levels of E Coli and Coliform in refill drinking water.

Constraints faced in the implementation of protection for consumers in the Drinking Water Depot business in the city of Cirebon are in the DAM which has not been extended by licenses and declared not feasible Hygiene Sanitation; does not allow an explanation and shows the refill drinking water treatment equipment to consumers; the increasing number of DAM in Cirebon City. Constraints from Consumers, among others, the lack of knowledge of the public (consumers) about the health quality requirements of drinking water and about the technical requirements of Sanitation-Friendly Drinking Water Depots; the public (consumers) want more easy and fast ways without having to go to DAM. Constraints from the Cirebon City Health Office, among others, the lack of complaints from the public; the Indonesian legal system that does not allow a dispute to be resolved quickly; The Health Office does not have the authority to follow up on depots that do not have permits due to the absence of a Regional Regulation that regulates more clearly about it, and can only give a warning and cannot provide other sanctions.

Keywords : Implementation of Consumer Protection, Drinking Water Depot Business